

KOMPETENSI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF

MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah

Kota Bandar Lampung)



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

FIKRI AHMADI

NPM : 1421030280

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

**KOMPETENSI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah
Kota Bandarlampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

FIKRI AHMADI

1421030280

Program Studi : Mu'amalah

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1439H/ 2018M

ABSTRAK

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau organisasi dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Selama ini pengelolaan harta wakaf dikelola oleh nazhir yang sebenarnya belum mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Maka profesionalisme dan kompetensi nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis wakaf apapun.

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung. Tujuan dan manfaat penelitian ini untuk mengetahui kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitiannya termasuk jenis penelitian lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diperoleh jawaban bahwa kompetensi atau kewenangan Nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis, jadi upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, nazhir pun banyak merangkap jabatan sehingga nazhir atas nama Muhammadiyah belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal. Dalam berbagai kitab fikih, nazhir bukan sebagai rukun wakaf namun jumbuh ulama sepakat wakif harus menunjuk pengelola wakaf baik ia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bandarlampung dalam mengelola amal usaha bidang pendidikan tidak bersifat perseorangan tetapi nazhir atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, hal ini tidak bertentangan dan sudah sejalan dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang, namun Persyarikatan cenderung menghendaki nazhir wakaf yang berbentuk Badan Hukum. Adapun masalah nazhir perseorangan menurut Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa nazhir perseorangan tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf, sedangkan nazhir yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kelangsungan dari pemanfaatan harta wakaf dan kekekalan sehingga tercapai dari tujuan wakaf dari harta wakaf tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratnin, Sukarame, Bandar Lampung, Telpn (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KOMPETENSI NAZHIR DALAM
PENGELOLAAN ASET WAKAF MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus
Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan
Muhammadiyah Kota Bandarlampung)

Nama Mahasiswa : Fikri Ahmadi
NPM : 1421030280
Program Studi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

NIP:197112282000031002

Dr. Jayusman, M.Ag.

NIP:197411062000031002

Ketua Jurusan Mu'amalah

Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.

NIP:197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarampe, Bandar Lampung, Telpn (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“KOMPETENSI NAZHIR DALAM PENGELOLAAN ASET WAKAF MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung)”** disusun oleh Fikri Ahmadi, NPM. 1421030280, Program Studi: Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakutas Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Rabu, 25 Juli 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Alamsyah. S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran/3 : 92)¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2006), h. 62.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt atas segala limpahan karunia, berkah, nikmat, dan rahmat-Nya, rasa sayang dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang, kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang tersayang:

- a. Kepada orang tua yang saya banggakan Ayahku Drs. H. Ahmad Istaji, dan Mamahku tersayang Saminah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi, dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya untuk menjadi anak yang dibanggakan. Dan berkat do'anyalah penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk Ayah dan Mamah untuk keberhasilan yang akan datang.
- b. Yang saya sayangi dan saya banggakan kakak Desminarti A.Md, Khodijah Febrianti A.Md, Shofi Ahmadi yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberi semangat motivasi bagi keberhasilan saya selama belajar.
- c. Terkhusus untuk Almamaterku (UIN Raden Intan Lampung) yang telah memberikan pengalaman yang berharga untuk membuka pintu dunia masa depan dan kehidupan yang akan datang.

RIWAYAT HIDUP

Fikri Ahmadi dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 16 Juli 1996, anak ke empat dari empat bersaudara oleh pasangan Bapak Drs. H. Ahmad Istaji dan Ibu Saminah.

Adapun pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. TK Al-Azhar 18 Bandarlampung, tamat berijazah tahun 2002
2. SDN 04 Labuhan Ratu Bandarlampung, tamat berijazah tahun 2008
3. SMPN 10 Bandarlampung, tamat berijazah tahun 2011
4. SMAN 5 Bandarlampung, tamat berijazah tahun 2014.
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag.M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.M.H. sebagai ketua jurusan/prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya, atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. dan Dr. Jayusman, M. Ag., masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
6. Sahabat seperjuangan Muhammad Ridho S.H, Debra Andini, Wilda Zara Junita.
7. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Syariah Jurusan Muamalah khususnya kelas Muamalah C.
8. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung yang telah membantu dalam proses penelitian sampai penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena kemampuan waktu yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun.

Bandar Lampung, 10 April 2018

Fikri Ahmadi
NPM. 1421030280



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf	17
B. Rukun dan Syarat Wakaf	23
C. Macam-Macam Wakaf.....	30
D. Pengelolaan dan Kompetensi Nazhir Menurut Hukum Islam.....	33

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Persyarikatan Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung	58
1. Sejarah Berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung	58
2. Struktur Organisasi Muhammadiyah	69
3. Visi Misi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung	76
B. Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nazhir	77
1. Kompetensi Nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah	77
2. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan dan Pengembangan	82
3. Upaya Pengembangan.....	85

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Aset Wakaf Berupa Amal Usaha Pendidikan Pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.....	87
--	----

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Aset Wakaf Berupa Amal Usaha Pendidikan Pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung	90
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: *“Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung)”*. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) atau kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilannya tersebut di dalam kehidupan nyata.²
2. Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nazhir adalah isim fa'il dari kata nazhir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nazhir wakaf atau biasa disebut nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.³

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 719.

³Fiqh Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI, 2006), h. 25.

3. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang.⁴
4. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁵ Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau Syariat Islam, yaitu “suatu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁶
5. Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, yang merupakan salah satu dari bentuk dan jenis Amal Usaha Persyarikatan, struktur dan kelembagaannya bersifat formal, berjenjang dari tingkat pendidikan dasar dan menengah serta madrasah dan pondok pesantren. Adapun bentuk, jenis, dan tingkat pendidikan Muhammadiyah itu pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengembangan misi Muhammadiyah khususnya dalam bidang pendidikan, yang terkait secara substansial dengan pendidikan Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana menjadi paham agama dalam Muhammadiyah, maupun secara kesejahteraan terkait pula dengan gagasan-gagasan dasar K.H. Ahmad Dahlan dalam merintis dan membangun pendidikan Muhammadiyah.⁷

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, h. 1062.

⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) h. 42.

⁶Hasbie Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998) h. 44.

⁷Ahmad Istaji, Sekretaris Eksekutif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Wawancara, 01 April 2018.

Jadi, yang penulis maksud dengan kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf pada amal usaha pendidikan di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung adalah bagaimana kewenangan atau kemampuan nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan yang di amanahkan oleh wakif menurut pandangan hukum Islam. Nazhir tidak cukup hanya memiliki kemampuan pengetahuan tentang perwakafan, namun harus juga memiliki kreativitas, motivasi, semangat, kesungguhan, rencana yang jauh kedepan, dan kemampuan manajerial serta kemampuan membangun jaringan.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Nazhir atau pengurus wakaf di dalam mengelola aset wakaf yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah sebagian belum didasarkan pada kewenangan dan kemampuan. Artinya belum memiliki misi dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai manfaat harta wakaf tersebut. Nazhir dalam memanfaatkan aset wakaf masih bersifat sosial dalam amal usaha pendidikan dan belum dikelola secara ekonomis. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

2. Secara Subjektif

Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu di jurusan Muamalah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Raden Intan Lampung. Belum adanya yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kegiatan bermu'amalah, baik dikalangan masyarakat kelas atas maupun dikalangan masyarakat kelas bawah, dari yang berada diperkotaan sampai di pedesaan. Hukum Islam telah mengatur hubungan manusia dengan TuhanNya (*Habluminallah*), manusia dengan manusia (*Habluminannas*) dengan alam sekitarnya (*Habluminal Alam*).

Pada hakekatnya kekayaan milik Allah semata, namun Allah swt telah menitipkan kekayaan tersebut kepada manusia, untuk dipergunakan dan diberdayakan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Allah swt berfirman dalam surat Adh-Dhariyat yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

*Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*⁸

Pelaksanaan ibadah dipraktekkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan dari manusia beserta segala apa yang dimilikinya. Ada ibadah yang dilakukan dengan pengabdian badan, seperti shalat, puasa atau juga bentuk pengabdian berupa pengorbanan harta benda, ilmu pengetahuan, seperti zakat, shodaqah, memberi ilmu pengetahuan.

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2006), h. 523.

Satu bentuk ibadah yang melalui pengorbanan dengan harta yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syari'at Islam diantaranya adalah wakaf. Wakaf telah disyari'atkan dan dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad saw.

Oleh karena itu, dalam Islam diadakan berbagai sarana atau institusi sosial, sebagai penghubung orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Salah satu institusi sosial Islam yang mengelola dibidang sosial adalah lembaga perwakafan. Hal ini sesuai dengan prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam, yang menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang.

Setiap kali kita berbicara tentang wakaf maka secara otomatis terkesan dalam pikiran kita, sesuatu pemberian dalam bentuk tanah atau bangunan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh suatu lembaga, baik untuk kepentingan ibadah, maupun kepentingan umum lainnya, sesuai ajaran Islam. Wakaf suatu bentuk manifestasi menafkahkan harta di jalan Allah.

Tanah atau harta benda yang telah diwakafkan sudah menjadi hak kepemilikan masyarakat umum, karena salah satu tujuan wakaf adalah selain untuk mengharap ridho dari Allah swt adalah untuk kepentingan masyarakat umum atau untuk kepentingan jamaahnya. Sebagai contoh seseorang yang mewakafkan tanah untuk membangun sebuah masjid, karena masjid merupakan tempat ibadah yang tidak bisa dikuasai oleh perseorangan, akan tetapi milik semua orang yang menganut agama Islam dan untuk kepentingan ibadahnya.

Terjadinya wakaf apabila wakif berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf dengan mengucapkan kata-kata wakaf atau yang disebut dengan akad

wakaf, dengan demikian maka harta yang telah diwakafkan sah menjadi tanah wakaf. Artinya tanah wakaf yang sudah terdaftar dengan sah maka tanah wakaf tidak bisa dikuasai atau dijual/dialih tangankan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan, karena dengan ikrar wakaf tersebut telah menghilangkan hak kepemilikan individu dan hartanya menjadi hak milik Allah swt.⁹ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ (رواه ابو داود)

Artinya: Sesungguhnya tidak dijual yang pokoknya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. (HR Abu Daud)¹⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, ini artinya tanah wakaf harus didayagunakan sesuai ikrar wakaf.

Wakaf dalam syari'at Islam telah dilaksanakan oleh Rasulullah, para sahabat-sahabatNya bahkan orang-orang Islam terus menerus mewakafkan hartanya hingga sekarang. Adapun rukun wakaf itu sendiri adalah: ada wakif atau orang yang mewakafkan, ikrar wakaf atau sighat wakaf, dan nazhir atau orang yang mengurus dan menjaga tanah wakaf. Sedangkan syarat wakaf itu sendiri ialah: untuk selama-lamanya tidak boleh bersifat sementara atau untuk dicabut kembali, tidak boleh mewakafkan barang yang menimbulkan fitnah apapun, dalam artian bahwa tanah yang akan diwakafkan tidak sedang bermasalah atau bersengketa, harus asli milik wakif, dan setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan

⁹Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 1993), h. 112.

¹⁰Muhammad Muhyiddin, Abdil Hamid, *Sunah Abudaud Jilid III*, (Bandung: Maktabah Dahlan, 1983), h. 116.

wakaf pada umumnya, yaitu tidak sah bila tujuannya tidak sesuai dengan ikrar wakaf apalagi tanah tersebut pindah tangan atau dijual.¹¹

Maka pemerintah memandang perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam masalah perwakafan, yakni dengan membuat peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau organisasi dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Selama ini pengelolaan harta wakaf dikelola oleh nazhir yang sebenarnya belum mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme dan kompetensi nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis wakaf apapun. Atau dalam peraturan perundang-undangannya bisa ditetapkan bahwa nazhir harus berbadan hukum. Untuk kepentingan yang lebih luas, nazhir harus memiliki cabang atau perwakilan di tingkat kecamatan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan nazhir. Hal ini disebabkan karena berkembang tidaknya harta wakaf, salah satu diantaranya sangat tergantung pada nazhir wakaf. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 20.

wakaf. Mengingat pentingnya nazhir dalam pengelolaan wakaf, maka di Indonesia nazhir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Pengangkatan nazhir ini tampaknya ditujukan agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nazhir adalah orang yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara benda wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia berkembang menjadi kelompok orang atau Badan Hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

Berdasarkan Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP RI No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 41 tentang Wakaf bahwa nazhir dapat dilakukan oleh organisasi atau badan hukum, maka Persyarikatan Muhammadiyah secara legal formal sebagai organisasi yang berbadan hukum, Muhammadiyah memiliki hak untuk melakukan kegiatan yang menyangkut dengan wakaf yaitu menerima dan mengelola wakaf (nazhir).¹²

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung hingga saat ini telah memiliki 32 bidang tanah yang tersebar setiap kecamatan di Kota Bandarlampung dan telah memiliki 16 Gedung Sekolah/Madrasah dari tingkat SD/MI-SMA/MA, 1 Gedung Panti Asuhan, 1 Gedung Pesantren, 5 Bangunan Masjid, Gedung Klinik Kesehatan/Balai pengobatan (namun klinik belum dioperasikan) dan sekarang juga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung sedang membangun Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Bandarlampung di Komplek Muhammadiyah Labuhan Ratu.¹³

¹²Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, (Jakarta: Menteng Raya, 2010), h. 27.

¹³Dian Permana, Sekretaris Majelis Wakaf, Wawancara, 15 April 2018.

Namun demikian, sebagian nazhir atau pengurus wakaf di dalam mengelola harta wakaf yang ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah masih bersifat tradisional-konsumtif, masih jauh dari harapan umat, atau belum memiliki misi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai manfaat harta wakaf tersebut. Hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman tentang tujuan dari wakaf tersebut, dan juga rendahnya Sumber Daya Manusia, maka tidak sedikit nazhir menelantarkan harta/tanah wakaf yang mempunyai nilai ekonomis di lokasi-lokasi strategis yang seharusnya aset umat tersebut dapat dikelola untuk usaha-usaha produktif yang menghasilkan. di Pimpinan Daerah Muhammadiyah nazhir dalam memanfaatkan harta wakaf masih bersifat sosial belum dikelola secara ekonomis, jadi upaya pengembangan manfaat wakaf masih terbatas atau belum maksimal. Disamping itu kenyataan yang terjadi di Persyarikatan bahwa ada sebagian wakaf yang masih belum disertifikatkan,¹⁴ atau sudah disertifikatkan tetapi masih atas nama perseorangan. Karena dalam mengurus sertifikat tanah wakaf di Muhammadiyah, nazhir belum memahami dengan memadai berbagai perangkat peraturan mengenai pendaftaran tanah dan prosedur pengurusannya sampai menjadi sertifikat dan balik namanya. Oleh karena itu bisa jadi harta wakaf tersebut dapat dipindah tangankan atau diperjual belikan, sehingga tidak tercapai maksud dari tujuan wakaf itu sendiri.

Sedangkan dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 216/KEP/I.0/B/2012, tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2012 M. dalam lampiran I.C.9.b. yang berbunyi: “Menertibkan administrasi tanah

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2015, *Standar Profesionalisme Nazhir*, h.16.

hak milik dan tanah wakaf Persyarikatan yang masih atas nama perorangan/nazhir perorangan menjadi atas nama Persyarikatan.¹⁵

Sehubungan dengan masalah di atas, menggugah inisiatif penulis untuk mencoba mengadakan penelitian yang berkenaan dengan kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf yang berbentuk amal usaha pendidikan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung, yang berbentuk skripsi dengan judul: Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Ahmad Istaji, Sekretaris Eksekutif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Wawancara, 01 April 2018.

- a. Untuk mengetahui kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan agar lebih memahami tentang tinjauan hukum Islam terhadap kemampuan seorang nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang membutuhkan.
- c. Untuk mengetahui persyaratan dalam menyelesaikan di Fakultas Syariah dalam mencapai gelar sarjana S1 dalam bidang muamalah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁶ Adapun lokasi penelitian ini adalah pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung yaitu sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.¹⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian ini menggambarkan tentang Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁸ Sumber data yang utama yaitu nazhir yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Bandarlampung. Data ini diambil dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi.

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cetakan ketujuh, CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 142.

¹⁸Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 4.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Populasi yang penulis maksudkan adalah seluruh nazhir oleh karena itu digunakan populasi. Mengingat jumlah populasinya cukup besar maka tidak dapat diwawancara seluruhnya, jadi penentuannya penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang mengemukakan bahwa jika populasinya besar dapat diambil antara 10-15% atau lebih.¹⁹

b. Sampel

Sampel adalah tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya akan diteliti. Hal ini sesuai dengan metode yang penulis gunakan yaitu metode Purposive Sampling (sampel bertujuan) yaitu sampel yang dilakukan dengan

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 134.

cara mengambil subjek bukan strata, random atau daerah akan tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Maksudnya adalah bahwa menentukan sampel tidak semua anggota dalam pengelola wakaf yang akan diteliti melainkan hanya orang-orang tertentu saja, yang di pandang representatif. Adapun sampel dalam penelitian ini 4 orang nazhir di Persyarikatan Muhammadiyah.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti dengan maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.²⁰ Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati dan mencermati bagaimana kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf.

b. Wawancara/Interview

Wawancara (Interview) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²¹ Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapat data tentang kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf berupa amal

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.252.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 86.

usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²² Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan.²³ Yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.
- c. Sistematisasi data, yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif

²² Arikunto, *Loc.cit.* h. 188.

²³ *Ibid*, h. 118.

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung yang di dapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian di analisis dengan teori untuk selanjutnya di tarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta itu di tarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁴ Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data mengenai nazhir yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf berupa amal usaha pendidikan pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offest 1989), h.42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “*Waqofa*” yang berarti menahan atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *waqofa* – *yaqifu* – *waqfan* (وقف – يقف – وقفا) sama artinya dengan *habasa* – *yahbisu* – *habsan* (حبسا – يحبس – حبس).²⁵ Oleh karena itu, tempat parkir disebut mauqif, karena disitulah berhentinya kendaraan, demikian juga padang Arafah disebut juga mauqif dimana para jamaah berdiam untuk wukuf.²⁶

Sedang wakaf dan *habas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Dalam kamus Al-Wasith dinyatakan bahwa *alhabsu* artinya *al-man’u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai’* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba’ wala yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah swt).²⁷

Kesimpulannya, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man’u* (mencegah atau melarang) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.

²⁵Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999) h. 23.

²⁶Achmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 3.

²⁷Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2007) h. 44-45.

Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.²⁸ Demikian pula dalam kamus Arab-Melayu disebutkan bahwa kata *al-habsu* yang berasal dari *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa*, yang berarti mewakafkan harta karena Allah.²⁹

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

وَفِي الشَّرْعِ: حَبَسَ الْأَصْلُ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرَةِ أَيَّ حَبَسَ الْمَالِ وَصَرَفَ مَنَافِعَهَا
سَبِيلِ اللَّهِ.

Artinya: “Wakaf menurut *Syara'*: yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (*sabilillah*).”³⁰

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani sebagai berikut:

وَفِي الشَّرْعِ حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

Artinya: “Menurut istilah *syara'*, wakaf adalah menahan dzat suatu benda dalam kepemilikan si wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya”.³¹

²⁸*Ibid.*

²⁹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.

51.

³⁰Usman, *Loc.cit.*

³¹*Ibid.*

Menurut Imam Taqiyudin :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ إِلَّا نَتَفَعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُونٌ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي عَيْنِهِ
تَصَرُّفٍ مَنَّا فَعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّ بِأَلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat harta tersebut, dan tidak boleh mentasarrufkannya. Manfaat benda tersebut, harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan kepada Allah swt”.³²

Batasan mengenai wakaf banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan: menurut istilah syara’ wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah swt.³³ Muhammad Jawad Mughniyah menyebutkan bahwa wakaf ialah: “Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang manfaat”.³⁴

Sementara dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”.³⁵

³²Ibid.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), h.148.

³⁴Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press, 2005) h. 8-9.

³⁵Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) h. 3.

Berdasarkan paparan mengenai pengertian wakaf, secara menyeluruh dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup wakaf,³⁶ yaitu:

- a. Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi
- b. Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang;
- c. Mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang;
- d. Berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya;
- e. Menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya;
- f. Mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif;
- g. Mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif;
- h. Mencakup pentingnya penjagaan harta wakaf.

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya

³⁶Qohar, *Op.Cit.*, 53-55.

wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat.³⁷

Dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw, antara lain:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” (QS. Ali ‘Imran/3 : 92).³⁸

Selain itu firman Allah swt mengenai wakaf dalam surat Al-Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang

³⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005). h. 22.

³⁸Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 241.

buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah/2: 267).³⁹

Adapun dalil-dalil hadis khusus tentang disyariatkannya wakaf, diantaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a :


عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَى عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنَّ شَرِّهُ حَبَسَتْ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهِ أَعْمَرَانَهُ لَا يُبَاعَ وَلَا يُؤْتَى هَبْ وَلَا يُورَثْ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه المسلم)⁴⁰

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a: Bahwa Umar bin Khattab mendapat tanah di Khaibar, lalu ia datang menghadap Nabi saw untuk bermusyawarah tentang tanah itu katanya: Hai Rasulullah saya mendapat tanah di Khaibar dan belum pernah saya mendapat harta benda yang lebih indah dari itu dalam pandangan saya. Apakah yang tuan perintahkan tentang tanah itu? Sabda beliau: jikalau engkau mau, wakafkan. Kata Rawi: lalu di wakafkan oleh Umar. Tanah itu tiada boleh dijual, diberikan atau dipusakakan. Dan buahnya diberikan untuk fakir miskin, karib kerabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk jalan Allah (membantu agama Allah), untuk orang yang dalam perjalanan dan untuk tamu. Orang yang memeliharanya boleh mengambilnya dengan cara yang patut dan memberi makan orang lain, akan tetapi tidak boleh dijadikan uang. (HR. Muslim: 5/74)

Dasar Hukum Wakaf menurut Hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu:

³⁹Departemen Agama, *Op.Cit.*, 67.

⁴⁰Al Imam Al-Bukhary, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV*, (Malaysia: Klang Book Centre 1988), h. 95.

- 
- a. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
 - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
 - d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
 - e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
 - f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.⁴¹
 - g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
 - h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

Sesuai dengan *fiqh* Islam, maka dalam perspektif hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun),⁴² yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*waqif*) sebagai subjek wakaf.
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*).

58. ⁴¹Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 57-

⁴²Usman, *Op.Cit.*, h. 32.

3. Tempat berwakaf (*mauquf 'alaih*), yaitu tempat kemana diwakafkannya harta itu.
4. Adanya '*aqad* atau *lafaz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*mauqufalaihi*).

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat, walaupun mereka juga berselisih pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat tersebut.

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif). Sedangkan Qobul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun, disebabkan akad tidak bersifat mengikat. Sedangkan menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali bahwa rukun wakaf ada empat : 1) *Waqif* (yang mewakafkan), 2) *Mauquf 'alaih* (orang yang menerima wakaf), 3) *Mauquf* (benda yang diwakafkan) dan 4) *Sighat*.⁴³

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukkan Harta Benda Wakaf, Jangka Waktu Wakaf.⁴⁴

⁴³Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat Press, 2005) h. 16-17.

⁴⁴Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) h. 5-6.

Sedangkan pembahasan seputar syarat-syarat wakaf diatur pada bagian-bagian berikutnya.

1. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum). Wakif meliputi: Perseorangan, Organisasi, Badan Hukum. (Pasal 7)

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan Pemilik sah harta benda wakaf. (Pasal 8 ayat 1)

Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (Pasal 8 ayat 2)⁴⁵

2. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum).

Nazhir mempunyai tugas yaitu: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada

⁴⁵*Ibid*, h. 6.

Badan Wakaf Indonesia (Pasal 11 Bagian Kelima tentang Nazhir, BAB II Dasar-dasar wakaf). Nazhir meliputi: Perorangan, organisasi, dan Badan Hukum (Pasal 9)

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (Pasal 10 ayat 1)⁴⁶

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan : Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (Pasal 10 ayat 2)

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

⁴⁶*Ibid*, h. 8.

- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. (Pasal 10 ayat 3).

3. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif. (Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum)⁴⁷

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, (Pasal 15 Bagian Keempat)

Harta benda wakaf terdiri dari : Benda tidak bergerak, Benda bergerak (Pasal 16 ayat 1). Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a). Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b). Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
- c). Tanaman dan benda satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d). Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 16 ayat 2)

⁴⁷*Ibid*, h. 4.

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 16 ayat 3).⁴⁸

4. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. (Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum).

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (Pasal 17 ayat 1 Bagian Ketujuh tentang Ikrar Wakaf).

Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. (Pasal 17 ayat 2).

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. (Pasal 18)

⁴⁸*Ibid*, h. 10.

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW. (Pasal 19)

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan : (Pasal 20) dewasa, beragama Islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. (Pasal 21 ayat 1)⁴⁹

Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat: (Pasal 21 ayat 2) nama dan identitas wakif, nama dan identitas nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf (sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 dan 5, BAB II Dasar-dasar Wakaf Bagian Kedua Tentang Tujuan dan Fungsi Wakaf), harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (Pasal 22 Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf)⁵⁰

⁴⁹*Ibid*, h. 13.

⁵⁰*Ibid*, h. 14.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. (Pasal 23 ayat 1)

Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. (Pasal 23 ayat 2)

6. Jangka Waktu Wakaf

Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih mendetail baik dalam UU Wakaf No. 41 tahun 2004 atau dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf.

C. Macam-Macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syari'at Islam, dilihat dari penggunaan atau yang memanfaatkan harta benda wakaf terbagi dua :

1. Wakaf Ahli/*Dzurry*

Wakaf ahli yang terkadang juga disebut dengan wakaf '*alal aulad*' yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.⁵¹ Atau wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.⁵² Atau dalam pengertian lain adalah wakaf yang diperuntukkan

⁵¹Usman, *Op.Cit.*, h. 35.

⁵²Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005) h. 14.

bagi jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri dengan syarat dipakai semata-mata untuk kebaikan dan berlaku selama-lamanya.⁵³

Wakaf ahli adalah wakaf yang dikhususkan oleh yang berwakaf untuk kerabatnya, seperti anak, cucu, saudara dan ibu bapaknya. Wakaf ini bertujuan untuk membela nasib mereka. Dalam konsepsi Islam, seseorang yang hendak mewakafkan sebagian hartanya sebaiknya lebih dahulu melihat kepada sanak family, bila ada diantara mereka yang sedang membutuhkan pertolongannya. Maka wakaf lebih afdhal (lebih baik) diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian yang Rosul nasehatkan kepada Abu Thalhah.

Pada negara-negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair tanah wakaf untuk keluarga telah dihapuskan, karena pertimbangan berbagai segi, tanah-tanah wakaf bentuk ini tidak produktif.⁵⁴

Demikian pula dalam konteks hukum positif di Indonesia, wakaf ahli ini pun tidak diakomodir dalam berbagai aturan perundang-undangan tentang wakaf, termasuk pula dalam Kompilasi Hukum Islam dan yang terakhir Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Rupanya para pakar hukum dan pembuat undang-undang di Indonesia pun telah bersepakat untuk menghapuskan wakaf ahli/dzurry di Indonesia, karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang wakaf tersebut yang mengatur masalah wakaf ahli/dzurry ini.

⁵³Halim, *Op.Cit.*, h. 24.

⁵⁴*Ibid.* hal. 35.

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* artinya wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.⁵⁵

Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil manfaatnya.⁵⁶

Jenis wakaf ini seperti yang diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya.

Wakaf ini ditujukan untuk umum, dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁵Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, h. 16.

⁵⁶Suhendi, *Op.Cit.*, h. 245.

⁵⁷*Ibid.* h.19.

D. Pengelolaan dan Kompetensi Nazhir Menurut Hukum Islam

Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satu pun ulama yang menyatakan nazhir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain.⁵⁸ Juhur ulama fikih berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkannya kepada orang yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nazhir terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya.⁵⁹ Dalam masalah hak wakif sebagai nazhir wakaf, terjadi perbedaan pendapat ulama, ulama Hanafiyah seperti Abu Yusuf menyatakan perwalian atas harta wakaf ada pada wakif, baik ia mensyaratkan atau tidak. Karena ia adalah orang yang paling tahu tentang harta yang diwakafkannya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada wakif kecuali ia mensyaratkannya ketika ikrar wakaf. Ulama Malikiyah berpendapat wakif tidak berhak atas perwalian terhadap harta yang diwakafkannya.⁶⁰ Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nazhir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting.

⁵⁸Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 39.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*, h. 40.

Perwalian dalam perwakafan merupakan suatu keniscayaan untuk setiap barang yang diwakafkan. Karena dalam setiap harta wakaf, diharuskan adanya pengelola. Pengelola wakaf tersebut berkewajiban menjaga harta wakaf, mengembangkan, mengeksploitasinya, memanfaatkan, dan membagikan keuntungannya kepada mereka yang berhak. Orang yang ditugaskan itu dinamakan dengan nazhir atau *mutawalli* atau *qayyim*.⁶¹

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazhir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan *mutawalli* yang berarti pengelola, manajer, yang diberi kuasa, berkomitmen, dan eksekutif.⁶² Nazhir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Ini berarti ia adalah seorang manajer dari harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah fikih dikenal dengan nazhir *waqf* atau *mutawalli* wakaf termasuk hal yang sangat krusial. Hal itu terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazhir. Oleh sebab itu, nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan demi kesinambungan harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

kepada nazhir karena di tangan nazhirlah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi dilakukan secara terus-menerus untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih cepat. Salah satu alternatif solusinya itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif. Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran nazhir wakaf (pengelola wakaf) yang amanah dan professional sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal.

Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain paradigma bentuk harta yang diwakafkan, pengelola dan peruntukannya, begitu juga dengan pemilihan nazhir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nazhir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf karena berhasil tidaknya pengelolaan harta wakaf sangat terkait dengan kapasitas dan integritas nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nazhir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria

dan persyaratan nazhir, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nazhir adalah:

1. Adil dan amanah dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. Dasarnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁶³

2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Namun, para ulama tidak mensyaratkan laki-laki terhadap nazhir wakaf karena Umar ibn Khatab pernah berwasiat kepada Hafsa untuk memelihara harta wakafnya.
3. Islam. Namun, di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi nazhir. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2006), h. 87.

sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nazhir diberikan kepada orang non-muslim. Begitu juga penerima wakaf boleh saja muslim dan non-muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelolaan wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik muslim dan non-muslim.⁶⁴

Persyaratan nazhir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas nazhir. Karena itu, undang-undang wakaf memberi kriteria lebih ketat pada nazhir. Dia bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga harus berkemampuan manajerial.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan, bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum,⁶⁵ seperti uraian berikut:

1. Nazhir Perseorangan, merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang.⁶⁶ Ia disyaratkan: a) Warga Negara Indonesia,

⁶⁴*Ibid.*, h. 42.

⁶⁵Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Tahun 2016, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, h. 7.

- b) Beragama Islam, c) Dewasa, Amanah, d) Mampu secara jasmani dan rohani, e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁶⁷ Untuk nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh wakif. Ia wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nazhir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.⁶⁸
2. Nazhir Organisasi, merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan: a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada; c) memiliki: (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rumah tangga; (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁶⁹ Sama halnya dengan nazhir perseorangan, nazhir organisasi pun wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).
3. Nazhir Badan Hukum, adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak

⁶⁶*Ibid.*, h. 46.

⁶⁷*Ibid.*, h. 5.

⁶⁸*Ibid.*, h. 46.

⁶⁹*Ibid.*, h. 48.

di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁷⁰ Ia harus memenuhi persyaratan: a) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan; b) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; c) Memiliki: (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang; (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rumah tangga; (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁷¹ Nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.

Berdasarkan pengertian dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang nazhir ini, jelas dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya, keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Harta wakaf tentu harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang punya kepribadian yang baik dan mempunyai keahlian manajerial yang handal.

Agar nazhir bekerja sesuai dengan apa yang disyaratkan wakif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya di setiap Negara yang wakafnya sudah berkembang dengan baik dibentuk suatu

⁷⁰*Ibid.*, h. 6.

⁷¹*Ibid.*, h. 48.

lembaga atau badan yang salah satu tugasnya adalah membina dan mengawasi nazhir. Di Indonesia misalnya, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang,⁷² antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam Pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini terlihat bahwa BWI selain mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga mempunyai tugas untuk

⁷²*Ibid.*, h. 17.

membina para nazhir, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi sebagaimana disyariatkannya wakaf.

Inti ajaran yang tergantung dalam wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak dibiarkan tanpa hasil. Karena semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, akan semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada wakif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan harta wakaf secara produktif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pengelolanya (nazhir). Nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf. Dia mempunyai tanggung jawab untuk menangani seperti mengelola dan memelihara harta wakaf. Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu, para fukaha sepakat, bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Mengelola dan memelihara harta wakaf ini harus didahulukan dari membagikan hasil wakaf kepada mustahik.⁷³ Dalam mengelola dan upaya mengembangkan harta wakaf, nazhir dapat melakukannya dengan cara:

1. Menyewakan harta wakaf jika hal itu akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Hasilnya dapat digunakan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan harta wakaf dan disalurkan kepada mustahik.

⁷³Rozalinda, *Op.Cit*, h. 46..

Dalam masalah menyewakan harta wakaf, dikalangan Hanafiyah menyatakan jika wakif mensyaratkan wakaf disewakan dalam waktu tertentu, misalnya satu tahun atau lebih, maka nazhir harus tunduk pada persyaratan tersebut. Akan tetapi, ulama lain dari golongan Hanafi menyatakan menyewakan harta wakaf dalam jangka waktu yang lama tidak dibolehkan, karena hal tersebut membawa pada berubahnya fungsi wakaf.⁷⁴ Menurut Mazhab Maliki, nazhir wakaf dibolehkan menyewakan harta wakaf selama satu atau dua tahun apabila harta itu berbentuk tanah, tetapi bila harta wakaf itu berupa lahan kosong yang sudah lama tidak produktif, maka boleh disewakan dalam waktu yang lama, seperti 40-50 tahun. Namun, ulama ini mensyaratkan harga sewanya tidak boleh kurang dari harga sewa yang berlaku (harga pasaran).⁷⁵ Menurut Ulama Syafi'i, apabila harta wakaf disewakan dengan harga yang lebih rendah dari harga sewa yang berlaku di daerah setempat, maka akad sewa itu dianggap tidak sah. Akan tetapi, menurut Ulama Hanbali, akad sewa ini tetap sah dengan syarat kekurangan harga sewa menjadi tanggung jawab nazhir.⁷⁶

2. Menanami tanah wakaf untuk pertanian atau perkebunan, baik dengan cara menyewakan maupun dengan cara kerja sama bagi hasil, seperti muzara'ah dan musaqah, ataupun nazhir sendiri yang mengelola tanah tersebut. Bentuk kegiatan ini jelas akan memberi dampak positif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

3. Membangun bangunan di atas tanah wakaf. Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat membangun bangunan seperti pertokoan atau perumahan di atas tanah wakaf untuk disewakan, walaupun wakif tidak memberikan syarat apa pun. Hal ini dilakukan karena terdapat kemaslahatan yang lebih utama dan manfaat yang lebih besar akan dapat dirasakan oleh mustahik.
4. Mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf. Untuk kepentingan mustahik, nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, misalnya jika harta wakaf itu berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, ataupun pertokoan, ataupun bentuk lain yang ia kehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dari wakif dan tujuan wakaf.⁷⁷

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan oleh wakif. Artinya, ia tidak berhak men-tasyaruf-kan harta wakaf atas keinginan pribadi atau keluarganya, berutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjamkan harta wakaf, dan mengizinkan orang lain menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan syar'i, karena ia terikat dengan ketentuan yang dipersyaratkan wakif.

⁷⁷*Ibid.*, h. 47.

Dalam konteks ini, perlu dipertanyakan dari mana sumber dana untuk melakukan pemeliharaan harta wakaf? Jika wakif menyediakan dana khusus untuk itu, nazhir hendaknya menggunakan dana yang telah disiapkan wakif untuk pengelolaan harta wakaf, baik dana itu berasal dari harta miliknya maupun biaya pemeliharaan harta wakaf yang diambil dari hasil wakaf itu sendiri. Bila harta wakaf keadaannya sudah siap untuk dimanfaatkan, seperti rumah yang siap untuk disewakan atau tanah yang siap untuk ditanami, dana pemeliharaan dapat diambil dari hasil harta wakaf itu sendiri. Jika harta wakaf membutuhkan dana pemeliharaan, nazhir harus memprioritaskan dana perawatan dari pada membagikannya kepada mustahik. Bila harta wakaf digunakan untuk sarana umum, seperti masjid, nazhir dapat menggunakan hasil wakaf untuk kepentingan pembangunan atau perawatan masjid. Akan tetapi, bila masjid tidak mempunyai sumber dana, dana perawatan dapat diperoleh dari kas Negara (*baitul maal*).

5. Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara.⁷⁸

Nazhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari wakif yang sesuai dengan hukum sehingga nazhir tidak diperkenankan melanggarnya kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, seperti adanya kemaslahatan yang mendorong nazhir untuk melanggar syarat tersebut. Hal itu diajukan dan disetujui pengadilan. Para fukaha

⁷⁸*Ibid.*, h. 48.

menetapkan syarat yang dibuat oleh wakif ini sama dengan ketentuan yang ditetapkan syar'i.

6. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf. Nazhir wajib dengan sekuat tenaganya untuk mempertahankan harta wakaf dari sengketa dengan pihak lain. Usaha ini dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan pihak lain, seperti wakilnya atau dengan pengacara.
7. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri. Agar eksistensi dan keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi segala kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola dan pengacara, biaya persidangan, utang akibat biaya perawatan, dan lain sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf. Pelunasan itu harus diprioritaskan dari pada membagi hasil wakaf kepada para mustahik.⁷⁹
8. Mendistribusikan hasil atau manfaat wakaf kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf kepada para mustahik. Pembagian hasil wakaf harus dilakukan sesegera mungkin oleh nazhir wakaf, kecuali ada kebutuhan mendesak, seperti biaya perawatan harta wakaf yang menuntut hasil wakaf dialokasikan untuk kepentingan tersebut, atau melunasi kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf. Karena hal itu harus didahulukan ketimbang menyerahkannya kepada para mustahik. Semua ketentuan pendistribusian hasil wakaf

⁷⁹*Ibid.*

kepada para mustahik harus berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan wakif.

9. Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat. Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya. Berdasarkan hal ini ia dapat diberhentikan dari jabatannya itu. Jika nazhir melakukan pengkhianatan atau mengelola harta wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, tugas mengelola harta wakaf dicabut oleh hakim (pemerintah) dan menyerahkannya pada orang lain.⁸⁰

Tugas nazhir wakaf ini lebih diperinci pada Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Nazhir mempunyai tugas:⁸¹

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, tanggung jawab nazhir, tidak hanya sekedar memelihara dan mempertahankan keberadaan harta wakaf saja, tetapi juga bertanggung jawab memproduktifkan harta wakaf. Dengan cara seperti ini manfaat wakaf, tidak hanya untuk kepentingan sosial keagamaan semata, tetapi juga dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

⁸⁰*Ibid.* h. 49.

⁸¹Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, *Loc., cit.*

Dalam melaksanakan tugas, nazhir berhak mendapatkan imbalan berupa gaji dan pembinaan dari pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia.

hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a menceritakan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَى عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَا مُرْنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمْرَانَهُ لَا يَبَاغَ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه المسلم)⁸²

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a: Bahwa Umar bin Khattab mendapat tanah di Khaibar, lalu ia datang menghadap Nabi saw untuk bermusyawarah tentang tanah itu katanya: Hai Rasulullah saya mendapat tanah di Khaibar dan belum pernah saya mendapat harta benda yang lebih indah dari itu dalam pandangan saya. Apakah yang tuan perintahkan tentang tanah itu? Sabda beliau: jikalau engkau mau, wakafkan. Kata Rawi: lalu di wakafkan oleh Umar. Tanah itu tiada boleh dijual, diberikan atau dipusakakan. Dan buahnya diberikan untuk fakir miskin, karib kerabat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk jalan Allah (membantu agama Allah), untuk orang yang dalam perjalanan dan untuk tamu. Orang yang memeliharanya boleh mengambilnya dengan cara yang patut dan memberi makan orang lain, akan tetapi tidak boleh dijadikan uang. (HR. Muslim: 5/74)

Kata-kata *la junaha ala man waliyaha an yakkula minha* pada hadis ini menunjukkan bahwa nazhir wakaf dapat menerima gaji atau penghasilan dari hasil keuntungan investasi aset wakaf produktif. Kemudian, ketentuan nash ini di Indonesia diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal

⁸²Al Imam Al-Bukhary, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV*, (Malaysia: Klang Book Centre 1988), h. 95.

12 yakni, dalam melaksanakan tugas nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁸³ Di samping itu, dalam melaksanakan tugas nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaannya nazhir harus terdaftar pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁸⁴

Masa bakti dan pemberhentian nazhir dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan aturan tentang masa bakti nazhir wakaf. Begitu juga dengan peraturan perwakafan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Muncul persepsi di masyarakat, bahwa jabatan nazhir itu adalah jabatan seumur hidup. Jika nazhir meninggal dunia, atau sudah uzur tidak diusulkan penggantinya sama sekali. Akibatnya, harta wakaf tidak terkelola sebagaimana mestinya dan terabaikan. Malahan dalam keadaan seperti ini, ada harta wakaf yang diambil oleh ahli waris wakif.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Para ulama pada umumnya berpendapat jika nazhir berkhianat tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti minum-minuman keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak

⁸³Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, *Loc.Cit.*

⁸⁴Rozalinda, *Op.Cit.*, h. 50.

⁸⁵*Ibid.*

berfaedah, ataupun bila nazhir mengundurkan diri, wakif ataupun pemerintah dapat memberhentikan nazhir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf.⁸⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:⁸⁷

1. Meninggal dunia bagi nazhir perseorang.
2. Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum.
3. Atas permintaan sendiri.
4. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan atau dibebaskan tugasnya apabila: 1) Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir, 2) Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi suatu yang tidak bermanfaat, 3) Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, dan minum-minuman keras, 4) Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

⁸⁶*Ibid.*, h. 51.

⁸⁷Himpunan Peraturan perundang-Undangan Tentang Wakaf, *Op. Cit.*, h. 15.

Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah dan professional. Setelah itu, lembaga pengelola wakaf juga harus mampu mendesain sistem operasional yang memberikan kesempatan kepada para nazhir untuk berkembang dan berkarya sehingga menjadi nazhir yang benar-benar merupakan sebuah pilihan dan pengabdian kepada Allah swt.

Tidak dapat dipungkiri, mayoritas nazhir wakaf di Indonesia kurang professional dalam mengelola harta wakaf yang diamanatkan kepadanya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan (CSRC) menunjukkan jumlah nazhir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja sambil (84%).⁸⁸ Mereka memiliki pekerjaan tetap, seperti PNS/swasta, petani, pedagang dan sebagainya yang harus diutamakan di samping tugas sebagai nazhir. Kenyataan ini menggambarkan, bahwa profesi nazhir bukanlah profesi yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang diterima nazhir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf. Hasil survei ini juga menunjukkan hanya sebagian kecil nazhir yang mengaku menerima gaji sebagai nazhir (8%). Dari yang menerima gaji, sebagian besar menyatakan bahwa gaji yang mereka terima itu tidak memadai (82%).⁸⁹ Di samping itu, nazhir dipilih bukan atas dasar professional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat wakif, ataupun orang kepercayaan wakif.

⁸⁸Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006), h. 96.

⁸⁹*Ibid.*, h. 97-98.

Akibat dari ketidakprofesionalan nazhir, banyak harta wakaf tidak memberi manfaat kepada masyarakat, bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nazhir wakaf, ataupun dipersengketakan oleh ahli waris wakif. Realitas ini kadang kala menjadi kendala bagi calon wakif sehingga mereka ragu untuk mewakafkan hartanya. Untuk itu, nazhir wakaf harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat, bahwa amanah untuk mengelola harta wakaf bisa berhasil dan dapat mendatangkan manfaat kepada masyarakat sehingga calon wakif dapat tergerak hatinya untuk mewakafkan sebagian hartanya. Hal ini harus dibuktikan dengan dedikasi, loyalitas, keikhlasan, dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta wakaf.

Dalam rangka memelihara dan melestarikan manfaat harta wakaf, keberadaan nazhir wakaf sangat dibutuhkan bahkan menempati peran sentral. Sebab dipundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf, serta menyalurkan hasilnya kepada *mauquf 'alaih* (sasaran wakaf). Tidak dapat dipungkiri, banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang tidak efektif dan tidak mendatangkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Profesionalisme nazhir wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan harta wakaf.

Seorang nazhir professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan di mana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi

serta melibatkan komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik professional yaitu; Pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ini memungkinkan orang yang professional mengenali dengan baik dan tepat persoalan yang muncul dalam pekerjaannya dan mencari solusi yang tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dan mutu yang baik.

Kedua, adanya komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kelalaian, baik disengaja, maupun tidak dan ditujukan untuk melindungi profesi tersebut dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Ketiga, orang yang professional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. Ia dibayar dengan gaji yang layak sebagai konsekuensi dari pengorbanan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilan. Keempat, pengabdian kepada masyarakat, adanya komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi di mana orang-orang yang mengemban suatu profesi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan dirinya. Kelima, legalisasi, keizinan. Untuk profesi yang

menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.⁹⁰

Seorang professional adalah orang yang melakukan pekerjaan purna waktu, hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta punya komitmen yang tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir wakaf dianggap professional jika ia melakukan pekerjaan karena ia ahli di bidang itu, mengerahkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, seorang yang professional mempunyai komitmen yang kuat atas pekerjaannya. Ia melibatkan seluruh waktu, tenaga, pikiran dan serius dalam pekerjaannya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar dan tinggi atas pekerjaannya. Seorang nazhir yang professional dalam mengelola harta wakaf tidak sekedar mengisi waktu luang, atau pekerjaan sampingan. Akan tetapi, dia sadar dan yakin bahwa pekerjaannya menyatu dengan dirinya. Pekerjaan yang digelutinya membentuk identitas dan kematangan dirinya. Dia berkembang seiring dengan perkembangan dan kemajuan pekerjaannya.

Dalam melibatkan keseluruhan diri serta keahlian dan keterampilannya, seorang professional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Disiplin, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan. Oleh karena itu, seorang nazhir belum bisa dianggap professional jika dia menjalankan tugasnya mengelola harta wakaf atas dasar pekerjaan sampingan.

⁹⁰Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazir Profesional dan Amanah*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 75-78.

Karena seorang professional mengerahkan seluruh waktu, pikiran dan tenaganya. Lalu dia berhak memperoleh gaji yang memadai atas pekerjaannya.

Dalam pengembangan wakaf uang, ada tiga filosofi dasar yang harus ditekankan oleh nazhir. Pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”, bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, sesungguhnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama nazhir sering diposisikan sebagai kerja sambilan dalam pengertian dilakukan pada sela-sela waktu bukan perhatian utama dan wajib. Sebagai akibatnya, sering kali kinerja nazhir asal-asalan. Sudah saatnya nazhir menjadi profesi yang memberikan harapan masa depan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, asas transparansi dan *accountability*. Badan wakaf dan lembaga yang mengelola wakaf uang harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada lembaga regulator dan wakif dalam bentuk *audited financial report*, termasuk kewajaran dari masing-masing pos biayanya.⁹¹

Untuk pengembangan wakaf produktif, kualitas pengelolaan wakaf tentu harus ditopang oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf, pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan keuangan syariah. Dia mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara professional sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai kemampuan melakukan investasi harta

⁹¹Isbir, *Wakaf Produktif*, <http://bimasislam.depag.go.id>, 19 Desember 2007.

wakaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen SDM pada lembaga pengelola wakaf, terutama aspek perencanaan SDM yang komprehensif dan terprogram. Dengan demikian, ketersediaan SDM yang bermutu dan terampil, mutlak diperlukan. Karena SDM adalah faktor sentral dalam suatu organisasi.⁹²

Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi ini di masa mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Nazhir merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena nazhir sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Begitu pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir, diperlukan sistem manajemen SDM yang handal yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, professional, dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf yang sesuai dengan akhlak al-karimah.

⁹²Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 55.

3. Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf baik dari segi undang-undang wakaf maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah melakukan pengontrolan baik di pusat maupun di daerah.
4. Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas sehingga wakaf bisa menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya pembinaan nazhir wakaf agar mereka dapat menjalani tugas-tugas kenazhiran secara produktif dan berkualitas. Upaya pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen terkini, yakni melalui pendidikan formal, seperti sekolah kejuruan maupun sekolah umum untuk mencetak calon-calon SDM nazhir wakaf yang siap pakai. Misalnya, sekolah pertanian untuk calon nazhir yang akan dipersiapkan mengelola tanah wakaf yang berupa lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Lalu didirikan juga sekolah ekonomi untuk mengelola tanah wakaf untuk area perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian, dilakukan pendidikan nonformal berupa kursus-kursus, pelatihan kenazhiran yang terkait dengan manajerial organisasi atau keterampilan berupa teknik pengelolaan pertanian, perdagangan, pemasaran, perbankan, dan sebagainya. Nazhir yang ada, ditingkatkan kemampuannya baik melalui pelatihan yang intensif, maupun bimbingan. Ini akan

menghasilkan nazhir yang memiliki kemampuan dalam memikul tanggung jawabnya sebagai pengelola dan pengembang harta wakaf.

Para nazhir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, seperti amanah, akuntabilitas, transparansi, dan inovatif. Selain itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para nazhir, sehingga para nazhir dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga pengelola wakaf.⁹³



⁹³Rozalinda, *Op., Cit*, h. 56.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Persyarikatan Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung

1. Sejarah Berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung

Kehadiran Muhammadiyah di Kota Bandarlampung ditandai dengan kehadiran Pendidikan Muhammadiyah di Kota Tanjung Karang (Kota Bandarlampung) seiring dengan berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 1 Bandarlampung di Teluk Betung Selatan yang diresmikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung tahun 1958. Sedangkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung resmi berdiri Tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pendirian No : H.135/D-4/1973 Tanggal 21 Juni 1973.⁹⁴

Setelah dilihat dari sejarah tersebut Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kota Tanjung Karang lebih dulu lahir dari pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Tanjung Karang, hal ini terjadi karena pada tahun 1945-1983 wilayah Kota Bandarlampung masih dikenal dengan sebutan Kota Tanjung Karang dan pusat pemerintahan pada saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Lampung Selatan sehingga Muhammadiyah Kota Tanjung Karang atau sekarang dikenal Muhammadiyah Kota Bandarlampung secara otomatis masih dibawah kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah Lampung Selatan.

⁹⁴Dian Permana, Sekretaris Majlis Wakaf, Wawancara, 15 April 2018.

Setelah terbentuknya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Karang pada tahun 1973 yang diketuai oleh Buya H. Rafi'un Rafdi dan Sekretarisnya Drs. H. Fauzi Fattah maka seluruh kebijakan Persyarikatan di Kota Tanjung Karang tidak lagi menginduk dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lampung Selatan, kemudian membentuk Majelis dan Lembaga sebagai pembantu pimpinan Persyarikatan :

Adapun Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung adalah sebagai berikut:⁹⁵

1. Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus
2. Majelis Tarjih dan Tajdid
3. Majelis Dikdasmen, Pesantren dan Muhammadiyah Boarding School (MBS)
4. Majelis Pendidikan Kader
5. Majelis Kesehatan Umum dan Pelayanan Sosial
6. Majelis Ekonomi dan Pemberdayaan Ummat
7. Majelis Wakaf, Kehartabendaan dan Laziz
8. Majelis Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup
9. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
10. Lembaga Pengawasan Keuangan
11. Lembaga Hikmah, Kebijaksanaan Publik dan Litbang
12. Lembaga Seni Budaya dan Olahraga
13. Lembaga Informasi dan Pustaka

⁹⁵*Ibid.*

Dengan berjalanya waktu Muhammadiyah mulai melebarkan sayapnya hingga kesudut-sudut Kecamatan yang ada di Kota Bandarlampung, sehingga berangsur-angsur Muhammadiyah mendirikan beberapa Cabang Muhammadiyah di setiap Kecamatan yang ada di Kota Bandarlampung. Tidak lama setelah Muhammadiyah mendirikan Cabang Muhammadiyah kemudian mendirikan beberapa lembaga pendidikan. Dalam perjalanan Muhammadiyah, kegiatan dibidang pendidikan ini memang dipandang cukup berhasil. Pada era 1970-an beberapa sekolah dasar dan menengah telah didirikan, antara lain SD Muhammadiyah 2 diteluk Betung Selatan, SMP Muhammadiyah 4, SMA Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 1 Bandarlampung di Teluk Betung Utara.

Berikut ini sejarah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Karang berdasarkan periodisasi 1970-an:⁹⁶

1970 – 1973 Ketua : H. Rafi'un Rafdi

Sekretaris : Drs. H. Fauzi Fattah

1973 – 1976 Ketua : H.M. Arsyad Syirad

Sekretaris : Drs. H. Fauzi Fattah

Keberhasilan Muhammadiyah Kota Tanjung Karang dalam bidang pendidikan terdengar oleh H. Muslim Manaf, H. Dulhadi (Alm), Abdurrahman (Alm), Hasbi Sahid (Alm), dan ST Zainal Abidin (Alm) selaku penerima tanah wakaf dari Raden Sejahri Djaya Diwirya dan beliau-beliau juga sebagai panitia pembangunan Madrasah dan Mushalla di Labuhan Ratu

⁹⁶*Ibid.*

Kedaton pada tahun 1974/1975 yang sekarang dikenal sebagai kompleks Muhammadiyah Labuhan Ratu. Sehingga para Nazhir tersebut merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembangunan lembaga pendidikan dikarenakan banyak warga sekitar menyerobot bahkan ingin memiliki tanah wakaf tersebut dan peristiwa penyerobotan dan penggugatan tanah wakaf tersebut sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian warga yang hendak memilikinya. Penggugatan tersebut sampai ke pengadilan. Dalam hal ini panitia pembangunan memerlukan organisasi besar dan kuat yang bisa melanjutkan pembangunan dan penyelesaian perkara tanah wakaf tersebut. Maka mereka punya inisiatif menghibahkan kepengurusan tanah wakaf dari Raden Scjahri Djaya Diwiryia kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan hal tersebut disetujui oleh Raden Scjahri Djaya Diwiryia. Setelah Sah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Nazhir penerima wakaf dari Raden Scjahri Djaya Diwiryia, akhirnya Muhammadiyah dapat mengembangkan lembaga pendidikan, pada tanggal 7 Februari 1978 didirikanlah SPG Muhammadiyah Tanjung Karang namun tidak berjalan lama karena pada tahun 1989 pemerintah menerapkan suatu kebijakan menghapus SPG diseluruh Indonesia, maka SPG Muhammadiyah Tanjung Karang oleh Persyarikatan Muhammadiyah dialih fungsikan menjadi SMA Muhammadiyah Putri Kedaton Bandarlampung, berdasarkan hasil studi banding ke SMA Muhammadiyah 2 Putri Yogyakarta.⁹⁷

⁹⁷*Ibid.*

Namun kondisi sosial, ekonomi dan budaya di Provinsi Lampung berbeda dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya di Yogyakarta. SPG Muhammadiyah Bandarlampung yang pada Tahun Ajaran 1989/1990, meluluskan siswa sebanyak 5 kelas, ternyata pada tahun selanjutnya penerimaan kelas I hanya 1 kelas, dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Melihat respon masyarakat yang kurang antusias untuk menyekolahkan anaknya di SMA Muhammadiyah Putri, karena di Provinsi Lampung SMA putri belum begitu umum dimasyarakat. Maka melalui keputusan Rapat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kedaton sebagai lembaga pengelola, diputuskan untuk mengubah nama SMA Muhammadiyah Putri Kedaton Bandarlampung, pada tahun 1990-an menjadi SMA Muhammadiyah 2 Kedaton Kodya Bandarlampung, hingga saat ini. Dengan berjalanya waktu kompleks tersebut semakin besar dan berdirilah SMP Muhammadiyah 3, SD Muhammadiyah 1, dan SMK Muhammadiyah 2 Bandarlampung di atas tanah wakaf Raden Scjahri Djaya Diwirya (Alm). Sehingga jumlah Amal Usaha yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung semakin bertambah. Dengan berdirinya Amal Usaha tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Muhammadiyah dibidang pendidikan cukup menggembirakan. Berjalannya waktu Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dari TK sampai SMA di Labuhan Ratu mulai di minati oleh masyarakat Kota Bandarlampung karena sistem pendidikanya bagus dan tempatnya yang sangat strategis.

Berikut Sejarah Periodesasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Karang tahun 1976-1985 :

1976 – 1980 Ketua : H.M. Arsyad Syirad

Sekretaris : Drs. H. Fauzi Fattah

1980 – 1985 Ketua : Drs. H.M. Fuad Syiradj

Sekretaris : Drs. H. Fauzi Fattah

Sejak Periodesasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Karang tahun 1980-1985, maka menuntut pemikiran para Pimpinan Muhammadiyah menghendaki agar kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah pindah ke kompleks Muhammadiyah Labuhan Ratu, Akhirnya pada tahun 1980an kantor Daerah Muhammadiyah resmi berada di Komplek Muhammadiyah Labuhan Ratu beralamat di jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.14 Labuhan Ratu.⁹⁸

Hal yang menarik Pada Periode Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Karang tahun 1980-1985 setelah pindah kantor langsung mengganti/ balik nama dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tanjung Karang berganti nama menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung atau lebih akrab disingkat sebagai PDM Kota Bandarlampung. Hal tersebut Seiring dengan hari jadinya Pemerintah Kota Bandarlampung setelah diterbitkanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 dan kini menjadi Ibu Kota Pemerintah Provinsi Lampung.

⁹⁸*Ibid.*

Berikut sejarah perodesasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung tahun 1985-1990 :⁹⁹

1985 – 1990 Ketua : Prof. Drs. H.M. Yasun

Sekretaris : A. Hamid S., S.H.M.M.

Suasana Pendidikan Muhammadiyah Kota Bandarlampung semakin cemerlang dan menggembirakan pada periode ini dikarenakan diketuai oleh Dr. Yasun dan Sekretaris Hamid pada kepemimpinan beliau ada perumusan pembentukan tim panitia Pendirian Kampus Universitas Muhammadiyah Lampung dan akhirnya pada tahun 1987 Universitas Muhammadiyah Lampung berdiri kokoh di pinggir jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.14 Labuhan Ratu. Di kampus inilah tempat penampungan Siswa SMK, SMA dan MA Muhammadiyah Kota Bandarlampung melanjutkan pendidikanya.

Berikut sejarah Perodesasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung tahun 1990- 2005 :

1990 – 1995 Ketua : Drs. H. Baijuri Rasyid

Sekretaris : Slamet Risnanto, S.Ag.

1995 – 2000 Ketua : Drs. H. Irwan Amrullah. M.M.

Sekretaris : Slamet Risnanto, S.Ag.

2000 – 2005 Ketua : H. S.A. St. Adi Talarangan

Sekretaris : Drs. Irsyad Thaher

Pada tahun 1990-an Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung memberikan suasana baru kepada warganya dengan

⁹⁹*Ibid.*

mendirikan kembali lembaga pendidikan Muhammadiyah pada saat itu Muhammadiyah Kota Bandarlampung dinakhodai oleh Drs. H. M. Baijuri Rasyid selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung, pada periode ini Muhammadiyah Kota Bandarlampung hendak mewarnai pendidikan dengan nuansa pendidikan pesantren (*Boarding School*) dengan didirikanya Ponpes Budi Mulya, MTs Muhammadiyah, MA Muhammadiyah dan Panti Budi Mulya Muhammadiyah Sukarame.

Berikut sejarah periodesasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung tahun 2005-2010 :

2005 – 2010 Ketua : H.A. Rahmatan

Sekretaris : H. Ujang Suparman, M.A. Ph.D.

Muhammadiyah Pada periode 2005-2010 semakin menonjolkan semangat baru yaitu hendak melahirkan Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah dan pada saat itu banyak warga Muhammadiyah menghendaki berdirinya Sekolah Islam Terpadu maka pada Tahun 2006 Berdirilah SDIT Muhammadiyah yang berlokasi di kelurahan Gunung Terang Bandarlampung.

Berikut Sejarah Periodesasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung Periode 2010-2015.

2010-2015 Ketua : Drs. H. M. Baijuri Rasyid, M.Ag.

Sekretaris : Thabroni M. Zuhri, S.Ag.¹⁰⁰

¹⁰⁰*Ibid.*

Muhammadiyah pada era 2010-2015 di nakhodai kembali oleh Drs. H. M. Baijuri Rasyid, M.Ag pada periode kepemimpinan beliau dan didampingi oleh Sekretarisnya Thabroni M. Zuhri, S.Ag. Pada periode ini Muhammadiyah diuji kembali dengan perkara tanah kompleks Pendidikan Muhammadiyah Labuhan Ratu yang sempat di gugat Mas Noor Ismar Bin Permata Mail dan kawan-kawan namun berkat kegigihan dan kesabaran menghadapi ujian bisa terselesaikan dengan adanya surat pengantar dari PTUN Bandarlampung No : W1.TUN4/245/HK.06/V/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan surat pengantar dari PA Tanjung Karang No : W8-A1/362/HK.05/I/2013 tanggal 25 Maret 2013 yang di terima oleh Mahkamah Agung (MA) maka setelah disidangkan 2 kali oleh Tim Yudisial MA pada tanggal 9 Juli 2013 dan 27 Agustus 2013 bahwa gugatan Mas Noor Ismar Bin Permata Mail dan kawan-kawan di MA dinyatakan dengan amar putusan di TOLAK, (*keputusan tersebut baru di ketahui dari website mahkamahagung.go.id*) dan pada akhir 2013 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung telah mendapatkan salinan keputusan perkara tersebut dari Mahkamah Agung RI. Namun sampai saat ini Status Tanah kompleks Pendidikan Muhammadiyah Labuhan Ratu masih dilema karena masih dalam proses penyelesaian Sertifikat Tanah Wakaf di BPN Kota Bandarlampung. Namun dibalik ujian tersebut ada kegembiraan dimana pada saat yang bersamaan pada akhir tahun 2012 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Muhammadiyah (MITM) Kota Bandarlampung di Sukarame. Kemudian disamping itu Pembangunan Pendidikan Muhammadiyah Kota

Bandarlampung semakin terlihat dengan ditandai pembangunan ruang kelas baru SDIT Muhammadiyah, SD Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 1, SMP Muhammadiyah 3, SMP Muhammadiyah 4, MTs Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 1, SMA Muhammadiyah 2 dan SMK Muhammadiyah 2 Bandarlampung.¹⁰¹

Tabel 1
Aset Sekolah Pimpinan Daerah Muhammadiyah

NO	Sekolah	Alamat Sekolah	Nama Kepala Sekolah
1	SD Muhammadiyah 1 Bandarlampung	Jl. Z.A. Pagar Alam No.14 Labuhan Ratu Kedaton	Rudi Hartono, S.Pd.
2	SD Muhammadiyah Teluk Betung	Jl. WR. Supratman No.63 Teluk Betung	PJS Cabang
3	SD Muhammadiyah Panjang	Jl.Sukarno Hatta Baruna Jaya Panjang	Pak Hartoyo
4	SDIT Muhammadiyah	Jl.Purnawirawan Gg. Swadaya V Gunung Terang	Andri Sattriawan, S.Pd.
5	MI MBS Sukarame	Jl. Pulau Sangiang Gg. Madrash Sukarame Bandarlampung	Fita Jumrotussholihah, S.Pd.I
6	SMP Muhammadiyah 1 Bandarlampung	Jl. WR. Supratman No. 63 Teluk Betung	Zulaiha, S.Pd.I
7	SMP Muhammadiyah 2 Bandarlampung	Jl. Cut Nyak Dien No. 53 Kaliawi Tanjung Karang	Helmawati, S.Pd.MM
8	SMP Muhammadiyah 3 Bandarlampung	Jl. ZA. Pagar Alam No.14 Labuhan Ratu Kedaton	Wahdiyana, ST
9	SMP Muhammadiyah 4 Bandarlampung	Jl. Walter Monginsidi Durian Payung Tanjung Karang	Darlisman, S.Pd.
10	SMP Muhammadiyah 5 Bandarlampung	Jl. Soekarno Hatta	Hartoyo, S.Pd.

¹⁰¹ *Ibid.*

		Baruna Jaya Panjang	
11	Mts Muhammadiyah Bandarlampung	Jl. Pulau Sangiang Sukarame Tanjung Karang	Khaidir, S.Pd.I
12	SMA Muhammadiyah 1 Bandarlampung	Jl. Walter Monginsidi Durian Payung Tanjung Karang	Musli Khohani,S.Pd.I
13	SMA Muhammadiyah 2 Bandarlampung	Jl. ZA. Pagar Alam No.14 Labuhan Ratu Kedaton	Dra. Iswani
14	SMK Muhammadiyah 1 Bandarlampung	Jl. Walter Monginsidi Durian Payung Tanjung Karang	Hartati, S.Kom
15	SMK Muhammadiyah 2 Bandarlampung	Jl. ZA. Pagar Alam No.14 Labuhan Ratu Kedaton	Selamet Riyanto, S.Pd.
16	MA Muhammadiyah Bandarlampung	Jl. Pulau Sangiang Sukarame Tanjung Karang	Soheh, S.Pd.I

Selanjutnya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung Periode 2015-2020 atau periode sekarang dinakhodai oleh H. Ujang Suparman, MA, Ph.D sebagai ketua dan Sekretaris Thabroni M. Zuhri, S.Ag dan pada periode ini telah dirancang gagasan-gagasan baru baik dalam bidang Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Sosial sebagai bentuk program kerja dan tanggung jawab Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung periode 2015-2020 sebagai gerakan Pencerahan menuju Kota Bandarlampung yang berkemajuan.¹⁰²

¹⁰² *Ibid.*

2. Struktur Organisasi Muhammadiyah

Berdasarkan apa yang tercantum dalam pasal-pasal AD & ART Muhammadiyah, Qaidah Majelis dan organisasi otonom, serta laporan-laporan resmi, struktur organisasi Muhammadiyah dapat dilihat secara vertikal dan horizontal.

1. Struktur Vertikal

Secara vertikal, susunan organisasi dan Pimpinan Muhammadiyah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Struktur Vertikal

Muhammadiyah	Struktur pemerintah
Pimpinan Tingkat Pusat	Tingkat Nasional
Pimpinan Wilayah	Tingkat Provinsi
Pimpinan Daerah	Tingkat Kabupaten/Kotamadya
Pimpinan Cabang	--
Pimpinan Ranting	--

Tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah dalam Muhammadiyah masih ada kaitan dan persamaan jenjangnya dengan susunan pemerintahan (pasal 6 AD). Sedangkan untuk Cabang dan Ranting tidak dikaitkan lagi dengan wilayah pemerintahan, baik kecamatan maupun desa. Ini berarti dalam wilayah satu kecamatan bisa ditemukan beberapa Cabang Muhammadiyah. Atau sebaliknya, satu Cabang Muhammadiyah bisa meliputi wilayah beberapa Desa.¹⁰³

¹⁰³ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1992), h. 49.

2. Struktur Horizontal

Pada struktur horizontal, dapat dikenali tiga jenis kelembagaan yang terdiri dari:

- a. Majlis/bagian
- b. Organisasi otonom
- c. Biro/lembaga

Pada setiap jenjang organisasi Muhammadiyah dapat dibentuk Majlis (untuk tingkat Pusat, Wilayah, Daerah) atau Bagian (di tingkat Cabang dan Ranting) sebagai badan pembantu Pimpinan dalam melaksanakan usaha-usaha Persyarikatan (pasal 14 AD). Majlis atau Bagian melakukan kegiatan yang bersifat operasional yang langsung bertalian dengan pencapaian salah satu tujuan Muhammadiyah.¹⁰⁴

Majlis atau bagian yang dapat dibentuk meliputi:¹⁰⁵

- a. Majlis Tarjih
- b. Majlis Tabligh
- c. Majlis Hikmah
- d. Majlis Pendidikan, Pangajaran dan Kebudayaan
- e. Majlis Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU)
- f. Majlis Wakaf dan Kehartabendaan
- g. Majlis Ekonomi
- h. Majlis Taman Pustaka
- i. Majlis Bimbingan Angkatan Muda

¹⁰⁴Musthafa Kamal Pasha, dkk., *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, (Yogyakarta: Persahabatan Suci, 1971), h. 25.

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 74-79.

j. Majelis Pembina Karyawan.

Jumlah Majelis atau Bagian yang dibentuk di setiap jenjang, disesuaikan dengan kebutuhan riil yang dirasakan pada satu periode tertentu. Sedangkan Organisasi Otonom adalah badan yang dibentuk, dibimbing dan diawasi oleh Persyarikatan dan diberi hak mengatur rumah tangga sendiri untuk membina bidang-bidang tertentu untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah.¹⁰⁶

Tujuan dibentuknya organisasi otonom ialah untuk:¹⁰⁷

- a. Efisiensi Persyarikatan
- b. Dinamika Persyarikatan
- c. Pengembangan Persyarikatan.

Badan yang berupa organisasi otonom (ortom) dapat dibentuk jika terpenuhi syarat-syarat berikut:¹⁰⁸

- a. Mempunyai fungsi khusus dalam Persyarikatan
- b. Mempunyai potensi nasional
- c. Merupakan kepentingan/urgensi nasional.

Organisasi otonom yang dapat dibentuk di berbagai jenjang organisasi,¹⁰⁹ ialah:

- a. Aisyiyah
- b. Nasyiatul Aisyiyah
- c. Pemuda Muhammadiyah

¹⁰⁶*Ibid.*, h. 81.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 84.

- d. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
- e. Ikatan Sarjana Muhammadiyah (ISM)
- f. Ikatan Karyawan Muhammadiyah (IKM)
- g. Ikatan Guru Muhammadiyah (IGM)
- h. Ikatan Seniman Budayawan Muhammadiyah (ISBM)
- i. Persatuan Tani Islam (Petisi)
- j. Tapak Suci Putra Muhammadiyah.

Setiap organisasi otonom ini mempunyai AD & ART sendiri, mempunyai anggota sendiri dan dengan demikian mempunyai struktur vertikal juga, serta mempunyai tata cara/prosedur kerja dan hubungan organisasi sendiri. Organisasi yang dibentuk pada setiap jenjang horizontal, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan riil setempat.

Jenis badan yang ketiga adalah Biro, Lembaga atau Badan Khusus. Biro ini menjalankan tugas-tugas pelayanan yang tidak operasional atau kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah.¹¹⁰ Karena itu, pada dasarnya badan-badan ini hanya ada tingkat pusat saja.

Biro-biro yang dapat dibentuk oleh Pimpinan Pusat adalah:¹¹¹

- a. Biro Ideologi
- b. Biro Program
- c. Biro Kader
- d. Biro Organisasi

¹¹⁰*Ibid.*, h. 72.

¹¹¹*Ibid.*, h. 73.

- e. Biro Hubungan Luar Negeri
- f. Biro Keuangan
- g. Biro Dokumentasi dan Sejarah.

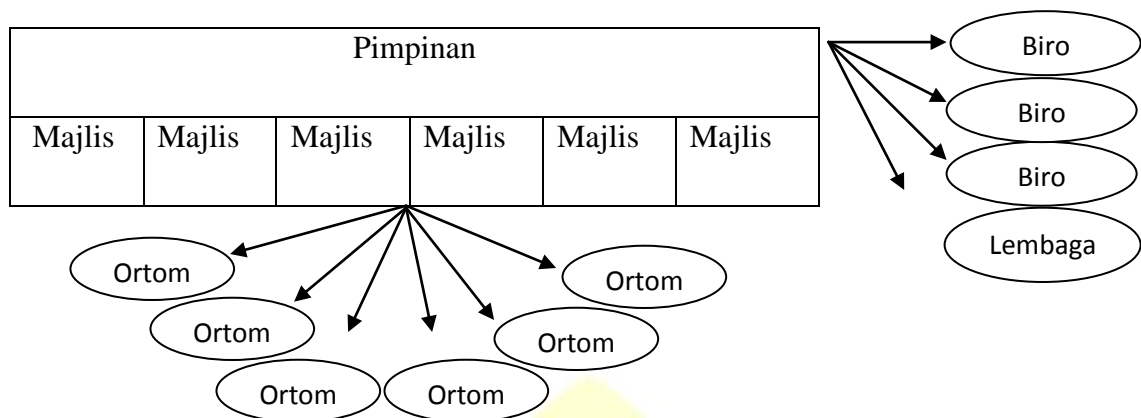
Biro/Lembaga yang secara riil telah dibentuk oleh PP Muhammadiyah sampai periode yang lalu adalah:¹¹²

- a. Biro Organisasi dan Kader
- b. Biro Hikmah
- c. Biro Hubungan Luar Negeri
- d. Biro Penelitian dan Ilmu Pengetahuan (di Yogyakarta) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Agama (di Jakarta)
- e. Badan Dakwah dan Bimbingan Masyarakat Terasing
- f. Badan Manajemen dan Akuntansi
- g. Lembaga Studi Ilmu Kerohanian
- h. Yayasan Baitulmal Muhammadiyah.

Dengan demikian kalau struktur horizontal pada satu jenjang Persyarikatan Muhammadiyah ini dibuat dalam bentuk skema, maka gambarannya lebih kurang seperti ini.

¹¹²Pimpinan Muhammadiyah, Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta, Yogyakarta, h. 14.

Tabel 3
Struktur Horizontal



Khusus untuk Majelis wakaf dan Kehartabendaan, tugasnya antara lain:¹¹³

- a. Menggembirakan dan memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf.
- b. Mengurusi masalah tanah dan hak milik Muhammadiyah sebagai barang amanat yang harus dipergunakan dan diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Tabel 4
Struktur Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung

Nama Organisasi	:	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung
SK Pendirian	:	No. H:135/0-4/1973 Tanggal 21 Juni 1973
Ketua	:	Drs. H. M. Ujang Suparman, MA,.Ph.D
Sekretaris	:	Thabroni M. Zuhri, S.Ag.
Anggota	:	Drs. H. Ngatio Haryanto Ir. H. Bambang Insyaf Sentosa H. Imam Asyrofi AC, M.P.d.I Ir. H. Gafri Gewang, MM

¹¹³Musthafa Kamal Pasha, dkk, *Op.cit.*, h. 16.

		<p>Drs. Hermansyah, MM</p> <p>Drs. Mukadi Ida Setiawan</p> <p>Drs. H. Suwita</p>
Alamat kantor	:	<p>Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No 14</p> <p>Labuhan Ratu Bandarlampung 35142, telpon (0721) 787820 Email : pdmmdl@gmail.com</p>
<p>Jaringan Muhammadiyah</p> <p>Cabang</p> <p>Ranting</p>	:	<p>12 Cabang (Kecamatan)</p> <p>44 Ranting (Desa/Kelurahan)</p>
Majelis-Majelis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majllis Tabligh dan Dakwah Khusus 2. Majlis Tarjih dan Tajdid 3. Majlis Dikdasmen, Pesantren dan Muhammadiyah Boarding School (MBS) 4. Majlis Pendidikan Kader 5. Majlis Kesehatan Umum & Pelayanan Sosial 6. Majlis Ekonomi dan Pemberdayaan Ummat 7. Majlis Wakaf, Kehartabendaan 8. Majlis Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup
Lembaga-Lembaga	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pengembangan Cabang & Ranting 2. Lembaga Pengawasan Keuangan 3. Lembaga Hikmah, Kebijaksanaan Publik dan Litbang 4. Lembaga Seni Budaya dan Olah Raga 5. Lembaga Informasi dan Pustaka 6. Lembaga Amil Zakat Infaq & Shodaqoh
Organisasi Otonom	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aisyiyah 2. Pemuda Muhammadiyah 3. Nasyiyatul Aisyiyah 4. Ikatan Mahasiswa Muhamamdiyah 5. Ikatan Pelajar Muhammadiyah 6. Hizbul Wathan 7. Tapak Suci

3. Visi Misi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung

Visi Persyarikatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung, Terwujudnya Masyarakat Kota Bandarlampung yang memiliki watak Tajdid dan senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin menuju *terwujudnya masyarakat Kota Bandarlampung menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya*.

Visi majlis wakaf kehartabendaan ialah berkembangnya fungsi wakaf dan kehartabendaan yang unggul dengan *good governance* dalam melakukan inventarisasi wakaf dan aset, sehingga terciptanya data base yang valid atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dan Pusat serta Amal Usaha Muhammadiyah.¹¹⁴

Misi Persyarikatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* mempunyai misi:¹¹⁵

1. Menegakkan keyakinan Tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah swt yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.
2. Memahami Agama Islam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

¹¹⁴Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2017), h. 38.

¹¹⁵Dian Permana, Sekretaris Majelis Wakaf, Wawancara, 15 April 2018.

3. Menyebarkan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an sebagai Kitab Allah terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

B. Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nazhir

1. Kompetensi Nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung. Bahwa nazhir ada yang berbentuk nazhir perseorangan dan ada yang berbentuk nazhir badan hukum. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum, telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, sepanjang penggunaan tanahnya berhubungan langsung dengan kegiatan keagamaan dan sosial.

Selain Persyarikatan Muhammadiyah dapat menjadi pemegang hak atas tanah, Persyarikatan Muhammadiyah dapat pula menjadi nazhir dari tanah wakaf sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah

No. 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Untuk nazhir yang berbentuk badan hukum berdasar Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Jumlah nazhir yang berbentuk badan hukum ditentukan sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di Kecamatan tersebut.
- b. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- c. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah wakaf.
- d. Menyelenggarakan administrasi perwakafan.
- e. Badan hukum yang tujuan dan amal usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagai pengurus atau nazhir sesuai dengan struktur dari Pimpinan Cabang sampai dengan Pimpinan Wilayah dalam hal ini kompetensi atau kewenangannya ada di Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.¹¹⁶

Nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung adalah sesuai dengan struktur yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya, bahwa siapa saja pengurus organisasi itu dapat dikatakan sebagai nazhir. Tergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf, dikatakan juga bahwa siapa saja pengurus organisasi ditingkat Cabang sampai pada Pimpinan Pusat bisa menjadi nazhir. Tetapi penekanannya lebih banyak ke siapa yang

¹¹⁶Thabroni M. Zuhri, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung, Wawancara, 20 April 2018.

akan mengelola atau siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa aset wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung dari segi kemanfaatannya masih bersifat sosial yang berupa amal usaha dibidang pendidikan dasar dan menengah serta madrasah dan pondok pesantren.

Menurut kompetensi atau kewenangan mengelola amal usaha pendidikan di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung telah diatur oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Peraturan Nomor 3/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, adapun kewenangan atau kompetensinya sebagai berikut:

1. Majelis Tingkat Wilayah Berwenang

- a. Mengusulkan pendirian SMA/SMK/MA/Mu'allimin-Mu'allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- b. Mengusulkan pendirian pondok pesantren kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- c. Mengusulkan pembubaran SMA/SMK/MA/Mu'allimin-Mu'allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SMA/SMK/MA/Mu'allimin-Mu'allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

- e. Mengangkat dan memberhentikan Wakil-Wakil Kepala SMA/SMK/MA/Mu'allimin-Mu'allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat.
- f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMA/SMK/MA/Mu'allimin-Mu'allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
- g. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tingkat SMA/SMK/MA/Mu'allimin-Mu'allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat.

2. Majelis Tingkat Daerah Berwenang

- a. Mengusulkan pendirian SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- b. Mengusulkan pendirian pondok pesantren kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- c. Mengusulkan pembubaran SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dengan persetujuan dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- e. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Kepala SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat.

- f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
 - g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SMP/MTs/SMP LB, dan SMA/SMK/MA/Mu'allimin-Mu'allimat/SMA LB dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
 - h. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah tingkat SMP/MTs/SMP LB dan bentuk lain yang sederajat.
3. Majelis Tingkat Cabang Berwenang, meliputi:¹¹⁷
- a. Mengusulkan pendirian SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
 - b. Mengusulkan pendirian pondok pesantren kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
 - c. Mengusulkan pembubaran SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melalui Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan

¹¹⁷*Ibid.*

Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah melalui Majelis Tingkat Daerah.

- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Majelis Tingkat Daerah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.
- f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pengawas SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah melalui Majelis Tingkat Daerah.
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian guru dan karyawan SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah melalui Majelis Tingkat Daerah.
- h. Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja SD/SDLB/MI/MD dan bentuk lain yang sederajat.

2. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan dan Pengembangan

Dari hasil wawancara, diketahui ada beberapa faktor penghambat nazhir dalam pengelolaan dan pengembangannya. Yaitu, Masih ada tanah yang belum bersertifikat atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, sedangkan dalam amal usaha pendidikan, sekolah ada yang dibangun berada di tanah wakaf yang belum bersertifikat. sehingga tidak memenuhi syarat dalam

menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Dinas Pendidikan, sedangkan dana BOS sangat diperlukan di dalam pengembangan sekolah.¹¹⁸

Adapun dalam mengurus wakaf sampai menjadi sertifikat atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, banyak Pimpinan Muhammadiyah di tingkat Daerah (Kabupaten/Kotamadya), lebih-lebih di tingkat Cabang yang belum memahami dengan berbagai perangkat peraturan mengenai pendaftaran tanah dan prosedur pengurusannya sampai menjadi sertifikat dan balik namanya.¹¹⁹

Pimpinan yang kelihatannya cukup memahami dan berpengalaman mengenai liku-liku peraturan dan prosedur pengurusan pendaftaran tanah ini adalah Pimpinan Muhammadiyah tingkat Wilayah, dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah Lampung.

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), nazhir tidak berfungsi dan berperan secara optimal, karena eksistensi para nazhir diposisikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja yang lillahi ta'ala, di samping itu kredibilitas dan kualitas individu masing-masing nazhir pun tidak memenuhi persyaratan untuk mampu mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf yang telah terkumpul. Melihat kondisi SDM nazhir yang demikian, ternyata implikasinya harta benda wakaf tidak terkelola secara profesional produktif, meskipun sesungguhnya wakaf tersebut berpotensi nilai ekonomis yang tinggi untuk dikembangkan, namun karena keterbatasan SDM pengelola, potensi harta benda wakaf belum dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Pimpinan Muhammadiyah di tingkat Daerah dan Cabang

¹¹⁸Iswani, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, Wawancara, 19 Mei 2018.

¹¹⁹Thabroni M. Zuhri, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung, Wawancara, 20 April 2018.

menyatakan tidak mempunyai tenaga khusus yang mampu mengurus masalah-masalah pendaftaran tanah ini. Untuk keperluan ini dibutuhkan tenaga yang tekun dan mempunyai banyak waktu.¹²⁰

Ditambah lagi kendala lainnya di Muhammadiyah selalu berganti pengurus dalam setiap 5 tahun, dan setelah berganti pengurus maka programnya terputus belum lagi jika pengurusnya meninggal.

Berdasarkan berbagai pengalaman mereka ketahui bahwa mengurus pendaftaran tanah ini memakan waktu cukup lama, melalui prosedur yang cukup melelahkan. Mereka sering harus berurusan dengan Kepala Desa, Kepala KUA Kecamatan, Camat dan terkadang diperlukan Surat Penetapan tentang fatwa waris dari Pengadilan Agama dan sesudah itu ke Kantor Agraria Kabupaten. Untuk setiap pihak/instansi yang diperlukan harus berurusan, berulang-ulang, baru selesai.¹²¹

Masih ada jalan pikiran atau anggapan sementara, bahwa tanpa sertifikat pun kedudukan hukum atau hak atas tanah yang ada pun sudah cukup kuat. Tanah yang sudah ada segel adatnya, atau surat keterangan hak lainnya, dan surat penyerahan melalui wakaf atau hibah dengan ditandatangani juga oleh para saksi, dianggap sudah memadai. Faktor lainnya yang menyebabkan belum didaftarkannya tanah Muhammadiyah karena masalah biaya.¹²²

Kemudian kebanyakan upaya nazhir di Persyarikatan Muhammadiyah mengembangkan tanah wakaf menjadi produktif lebih banyak ke pendidikan

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

dan tempat ibadah, sedangkan pengembangan yang mengarah pada ekonomi masih sedikit.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SMA Muhammadiyah, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sekolah yaitu bersaing dengan sekolah negeri untuk memperoleh murid, karena SMA Muhammadiyah adalah sekolah swasta pandangan masyarakat masih rendah terhadap sekolah swasta tertentu, mereka beranggapan sekolah SMA negeri itu lebih baik karena hal itu, akibatnya SMA Muhammadiyah sebagai sekolah swasta menerima siswa yang tidak diterima dari sekolah negeri.

Karena itu prestasi dalam kegiatan akademik yang masih kurang, tetapi SMA Muhammadiyah dalam prestasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) lebih unggul.¹²³

3. Upaya Pengembangan

Mengembangkan berarti melakukan suatu usaha memajukan, memanfaatkan, memproduksi aset-aset yang masih kosong/terlantar.¹²⁴ Kebanyakan upaya nazhir di Persyarikatan Muhammadiyah mengembangkan tanah wakaf menjadi produktif lebih banyak ke pendidikan dan tempat ibadah, tetapi yang bersifat ekonomi masih sedikit.

Aset wakaf dalam pendidikan, upaya yang dilakukan memajukan sekolah karena bersaing dengan sekolah negeri untuk memperoleh murid yaitu meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai guru yang baik, kepala sekolah serta team yang baik, agar bisa bersaing dengan sekolah negeri

¹²³Iswani, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, Wawancara, 19 Mei 2018.

¹²⁴Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji 2003, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, h. 67.

dengan salah satu cara yang dilakukan yaitu kepala sekolah dan guru yang lebih awal datang kesekolah, kemudian membuat suatu pelajaran yang memang sekolah Muhammadiyah menekankan misi sekolah Islam yang lebih di utamakan untuk keagamaannya, untuk masyarakat yang akan menyekolahkan anaknya yang bernuansa Islam. Dan juga menunjukkan perilaku yang baik, mengajarkan anak berkarakter baik dengan cara mencontohkan kebersihan dan juga kedisiplinan.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Aset Wakaf Berupa Amal Usaha Pendidikan Pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung

Nazhir adalah seseorang atau organisasi dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf. Oleh karena Muhammadiyah merupakan Persyarikatan yang berbadan hukum maka nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung mengatas namakan Persyarikatan Muhammadiyah. Nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung adalah sesuai dengan struktur yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya, bahwa siapa saja pengurus organisasi itu dapat dikatakan sebagai nazhir. Tergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan tanah wakaf, dikatakan juga bahwa siapa saja pengurus organisasi ditingkat Cabang sampai pada Pimpinan Pusat bisa menjadi nazhir. Tetapi penekanannya lebih banyak ke siapa yang akan mengelola atau siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tersebut.

Adapun dalam hal rekrutmen pengurus atau nazhir adalah sesuai dengan hasil musyawarah, baik ditingkat cabang, daerah dan wilayah. Dalam hasil musyawarah yang diadakan setiap periode jangka waktu 5 tahun. Dalam musyawarah tersebut diusulkan beberapa calon pengurus baik di tingkat musyawarah cabang, musyawarah daerah dan musyawarah wilayah, sehingga terbentuklah kepengurusan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Daerah serta Pimpinan Wilayah yang nantinya akan menjadi nazhir Persyarikatan.

Menurut penulis, bahwa praktek mengelola harta wakaf dari segi pengelolaannya pengurus Pimpinan banyak merangkap jabatan, sebagai contoh seorang kepala sekolah juga merangkap sebagai pengurus daerah. Disamping itu ada pengelola bukan orang yang berkompeten, maksudnya dia tidak mempunyai kewenangan didalam pengelolaannya. Misalnya seorang kepala sekolah tidak mungkin mengurus pensertifikatan tanah. Dan terkadang kepengelolaannya bukan pekerjaan utama apalagi di dalam kepengurusan tanah wakaf sampai menjadi sertifikat, yang seharusnya ditangani oleh majlis wakaf.

Sesuai dengan hasil penelitian di amal usaha pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung masih ada tanah wakaf Persyarikatan yang masih atas nama perseorangan belum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat tapi atas nama seseorang belum balik nama atas nama Muhammadiyah. Atau ada juga tanah wakaf yang belum disertifikatkan tetapi masih berbentuk akta jual beli. Sehingga nazhir atas nama Muhammadiyah belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal. Karena dalam mengurus pendaftaran tanah ini memakan waktu cukup lama, melalui prosedur yang panjang. Sedangkan dalam amal usaha pendidikan, sekolah ada yang dibangun berada di tanah wakaf yang belum bersertifikat.

Akibat dari masih adanya tanah yang belum bersertifikat atas nama Persyarikatan Muhammadiyah sehingga aset wakaf dalam mengembangkan pendidikan tidak memenuhi syarat dalam menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Dinas Pendidikan, sedangkan dana BOS sangat diperlukan di dalam pengembangan sekolah.

Masih adanya jalan pikiran atau anggapan sementara, bahwa tanpa sertifikat kedudukan hukum atau hak atas tanah yang ada pun sudah cukup kuat. Tanah yang sudah ada segel adatnya, atau surat keterangan hak lainnya, dan surat penyerahan melalui wakaf atau hibah dengan ditandatangani juga oleh para saksi, dianggap sudah memadai. Sehingga dalam pengelolaan aset wakaf belum mempunyai kekuatan hukum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.

Nazhir dalam memanfaatkan harta wakaf masih bersifat sosial belum dikelola secara ekonomis, jadi upaya pengembangan manfaat wakaf masih terbatas atau belum maksimal. Kemudian rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pun menjadi penghambat, implikasinya harta benda wakaf tidak terkelola secara profesional produktif. Pimpinan Muhammadiyah di tingkat Daerah dan Cabang menyatakan tidak mempunyai tenaga khusus yang mampu mengurus masalah-masalah pendaftaran tanah ini. Untuk keperluan ini dibutuhkan tenaga yang tekun dan mempunyai banyak waktu.

Demikian agar pengelola/nazhir Persyarikatan dalam mengelola aset tanah wakaf dapat mengelola secara maksimal maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 216/KEP/I.0/B/2012, tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2012 M. dalam lampiran I.C.9.b. yang berbunyi: “Menertibkan administrasi tanah hak milik dan tanah wakaf Persyarikatan yang masih atas nama perorangan/nazhir perorangan menjadi atas nama Persyarikatan. Sehubungan dengan hal tersebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginstruksikan agar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

(PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) melaksanakan penertiban administrasi tanah hak milik dan tanah wakaf Persyarikatan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kompetensi Nazhir dalam Mengelola Aset Wakaf Berupa Amal Usaha Pendidikan Pada Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung

Diawal sudah dijelaskan demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nazhir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 1 Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir mempunyai tugas: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia pada Pasal 11 Bagian Kelima tentang Nazhir, BAB II Dasar-dasar wakaf. Pada Pasal 9 diterangkan Nazhir meliputi: Perseorangan, Organisasi, dan Badan Hukum.

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum pada Pasal 10 ayat 1.

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1); dan Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (Pasal 10 ayat 2).

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. (Pasal 10 ayat 3).

Persyaratan Nazhir secara hukum Islam merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreativitas nazhir. Karena itu, undang-undang wakaf memberi kriteria lebih ketat pada Nazhir. Dia bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga harus berkemampuan manajerial.

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam hukum Islam kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Dalam berbagai kitab fikih, ketika membahas tentang rukun wakaf, tidak satu pun ulama yang menyatakan nazhir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan

terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Pada intinya dalam hukum Islam nazhir wakaf memegang peranan sangat penting. Karena setiap harta wakaf diharuskan adanya pengelola yang berkewajiban menjaga harta wakaf, mengembangkan, mengeksploitasikan, memanfaatkan dan membagikan keuntungannya kepada mereka yang berhak.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung berbentuk badan hukum atau atas nama persyarikatan bukan atas nama perseorangan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Karena menurut hukum Islam dan Undang-Undang membolehkan nazhir perseorangan ataupun nazhir badan hukum atau nazhir Persyarikatan. Sedangkan di Persyarikatan Muhammadiyah menghendaki dan menginstruksikan agar nazhir wakaf yang perseorangan supaya menjadi nazhir wakaf atas nama Persyarikatan.

Adapun masalah nazhir perseorangan menurut Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa nazhir

perseorangan tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf, sedangkan nazhir yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kelangsungan dari pemanfaatan harta wakaf dan kekekalan sehingga tercapai dari tujuan wakaf dari harta wakaf tersebut.

Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf. Seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi ini di masa mendatang. Sebaliknya, jika SDM tidak dikelola dengan baik, efektivitas pengelolaan wakaf tidak akan tercapai. Nazhir merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena nazhir sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Begitu pentingnya manajemen SDM ini, bila diabaikan, organisasi tidak akan berhasil mencapai tujuan dan sasarannya.

Sesuai dengan hasil penelitian di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandarlampung masih ada tanah wakaf Persyarikatan yang masih atas nama perseorangan belum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat tapi atas nama seseorang belum balik nama atas nama Muhammadiyah. Atau ada juga tanah yang belum disertifikatkan masih berupa akta jual beli. Sehingga nazhir atas nama Muhammadiyah belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal. Salah satu akibat dari masih adanya tanah yang belum bersertifikat atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga sulit untuk menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Dinas Pendidikan, sedangkan dana BOS sangat diperlukan di dalam pengembangan pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab terdahulu, baik dalam bab II yang berisi tentang landasan teori, maupun dalam bab III yang berisi laporan penelitian kemudian penulis mengadakan penganalisaan terhadap kedua pembahasan tersebut, maka dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan, antara lain

1. Kompetensi atau kewenangan Nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis. Upaya dalam pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada amal usaha pendidikan. Karena sumber daya manusia yang kurang, nazhir pun banyak merangkap jabatan sehingga nazhir belum dapat memanfaatkan harta wakaf secara maksimal.
2. Dalam berbagai kitab fikih, nazhir bukan sebagai rukun wakaf namun jumhur ulama sepakat wakif harus menunjuk pengelola wakaf baik ia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Bandarlampung dalam mengelola amal usaha bidang pendidikan tidak bersifat perseorangan tetapi nazhir atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, hal ini tidak bertentangan dan sudah sejalan dengan hukum Islam dan Undang-Undang. Meskipun tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-Undang, namun Persyarikatan cenderung menghendaki nazhir

wakaf yang berbentuk Badan Hukum. Adapun masalah nazhir perseorangan menurut Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai kelemahan-kelemahan, antara lain bahwa nazhir perseorangan tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf, sedangkan nazhir yang berbadan hukum dapat lebih menjamin kelangsungan dari pemanfaatan harta wakaf dan kekekalan sehingga tercapai dari tujuan wakaf dari harta wakaf tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan yang telah penulis paparkan diatas, memberikan inspirasi dan pemikiran untuk selalu mendukung terealisasinya perwakafan dalam Islam khususnya perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandarlampung, di sarankan.

1. Supaya nazhir di Persyarikatan Muhammadiyah dapat meningkatkan kinerja secara profesional dalam mengelola amal usaha pendidikan dan menertibkan tanah wakaf agar bersertifikat sehingga bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
2. Mengadakan kerja sama *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan pihak yang terkait untuk mempermudah administrasi kepemilikan harta wakaf sehingga nazhir Persyarikatan dapat mengelola wakaf secara maksimal.
3. Untuk meningkatkan kompetensi nazhir diperlukan upaya pembinaan dan pelatihan yang harus dilakukan berdasarkan standar pola manajemen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Al-Bukhary, Al imam, *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid I, II, III & IV*, Malaysia: Klang Book Centre 1988.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ash-Shiddieqy, Hasbie, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Syaamil Qur'an, 2006.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2003.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

- Fiqih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen RI, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*. Jakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- , *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offest, 1989.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, 2005.
- Isbir, *Wakaf Produktif*, <http://bimasislam.depag.go.id>, 19 Desember 2007.
- Istaji, Ahmad, Sekretaris Eksekutif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Wawancara, 01 April 2018.
- Iswani, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, Wawancara, 19 Mei 2018.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1993.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Standar Profesionalisme Nazhir*, Jakarta, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-Undanga*, Jakarta, 2016.
- Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, *Panduan Wakaf*, Jakarta: Menteng Raya, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhyiddin, Muhammad dan Abdil Hamid, *Sunah Abudaud Jilid III*, Bandung: Maktabah Dahlan, 1983.
- M. Zuhri, Thabroni, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandarlampung, Wawancara, 20 April 2018.

- Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006.
- Pasha, Musthafa Kamal, dkk., *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Persahabatan Suci, 1971.
- Permana, Dian, Sekretaris Majelis Wakaf, Wawancara, 15 April 2018.
- Pimpinan Muhammadiyah, Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta, Yogyakarta.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Gramasurya, 2017.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2007.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.